

Pansus Telusuri Dana Bantuan

SUNGAI RAYA—Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo bersama pimpinan dewan dan anggota DPRD lainnya berjanji untuk menelusuri dana bantuan atau hibah yang nilainya mencapai puluhan miliar ke tubuh PDAM Tirta Raya, Kubu Raya. “Kita bersama tim pansus akan menelusuri penggunaan dananya buat apa dan siapa penanggungjawab atau (satkernya),” kata dia kepada wartawan se usai jumpa pers, Selasa (10/7).

Menurutnya pembentukan pansus PDAM karena usulan fraksi-fraksi dan tim panja secara menyeluruh. Sebab, salah satu LHP BPK RI memberikan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) justru berada di tubuh PDAM. Sebagai institusi pelayan kebutuhan air masyarakat, pelayanan banyak dirasakan belum optimal. Padahal banyak dana bertabur baik dari pusat, provinsi dan daerah.

“Namun, kita dapat laporan dari warga yang kebenarannya masih diteliti tim pansus nantinya. Ternyata di lapangan masih ditemukan penambahan jaringan PDAM Tirta Raya terindikasi menarik bayaran ke warga. Sementara salah satu poin anggaran miliaran rupiah dari pemkab, provinsi dan pusat adalah membangun jaringan baru. Ini juga akan kita mintai keterangan di pansus nanti,” ujarnya. “Penambahan jaringan baru kalau anggarannya ada, tidak boleh membebani warga,” timpal dia kembali.

Sujiwo menambahkan kalau PDAM Tirta Raya dikelola baik akan mendatangkan potensi PAD bagi Kubu Raya. Sebab, beberapa daerah merupakan potensi primadona PAD seperti di Kecamatan Sungai Raya yang memiliki pelanggan tidak sedikit. Oleh karena itu bersama tim pansus dan para pimpinan siap mengawal LHP BPK RI. “Akan tetapi kami akan berjanji kalau nantinya tidak ada temuan, kami akan katakan tidak ada. Dan kita akan pulihkan nama PDAM. Namun kalau ada, kita juga sudah siapkan rekomendasi ke yudikatif,” ucap dia.

Pada kesempatan tersebut, Ketua PDIP Kubu Raya ini juga berharap para pemangku pimpinan PDAM Tirta Raya dapat selalu berkoordinasi. Terlebih soal LHP BPK RI, sudah beberapa kali tim panja melakukan pemanggilan. Padahal tujuannya hanya ingin meluruskan, mengklarifikasi dan merumuskan soal temuan BPK RI tersebut. “Mungkin saja, persepsinya di soal administrasi. Tetapi sampai sekarang, kita tidak dapatkan jawaban itu. Kita tidak tahu persoalannya, sehingga banyak catatan LHP BPK RI,” ujarnya.

Disamping itu, ia juga mengesalkan dalam setiap rapat dengar pendapat (RDP), ternyata pimpinan atau yang mewakili kerap tidak hadir. Disini dewan menilai ada persoalan di tubuh PDAM dan itikad tidak baik dalam mengklarifikasi dan menjelaskan soal LHP BPK RI. “Niatan kita hanya ingin membedah LHP BPK RI secara bersama-sama,” tandasnya.

Sujiwo juga meminta sudah waktunya Bupati mengambil sikap. Contohnya seperti di perda PDAM yang sudah disahkan tahun lalu, salah satu isinya memberikan kesempatan kepada pemerintah kabupaten merekrut dewan direksi dan tim pengawasannya. Sebab, Plt pimpinan akan berdampak kinerja juga. Sebagai otoritas sangat mungkin tidak dapat mengambil keputusan secara menyeluruh. “Dan mungkin juga karena otoritas belum penuh, ini menjadi salah satu sebab LHP BPK RI terkait hibah, aset dan anggaran mencuat,” ujarnya. **(den)**